

WAJAH REVOLUSI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT SEJARAH

Oleh: Adnan

Abstrak

Artikel ini ingin menelusuri dan mencari jawaban tentang pertanyaan seberapa jauh revolusi merealisasikan transformasi structural dan cultural. Selain itu dipertanyakan seberapa besar peranan sentral tokoh-tokoh revolusioner dalam menyusun strategi perjuangannya guna tercapainya kebebasan (freedom) dan kebersamaan? Artikel ini juga ingin menemukan bagaimana pula peran rakyat kecil (wong cilik) atau rakyat kebanyakan (grassroot) dalam revolusi itu, baik yang berdomisili di kota maupun di pedesaan?. Dari beberapa pertanyaan itu dapat ditelusuri bahwa tokoh-tokoh revolusioner sebagai “motor penggerak” revolusi, setidaknya dapat dipetakan ke dalam dua kategori, yaitu pertama, revolusi yang bersifat non-kooperatif radikal, dengan tokohnya Tan Malaka; dan kedua, revolusi yang bersifat kooperatif-moderat, yang tokohnya adalah Soekarno, Hatta dan Syahrir. Pendekatan yang dilancarkan oleh golongan yang pertama lebih memilih perombakan masyarakat secara total dalam segala dimensi kehidupannya yang meliputi politik, ekonomi, social, budaya, sementara golongan yang kedua lebih suka memakai jalur diplomatik dengan tetap mempertahankan hal-hal “warisan lama” yang dipandang masih perlu dilestarikan. Revolusi sebagai sebuah wacana actual di tengah kemelut kebangsaan pasca kemerdekaan pada mulanya hanya terasa di kota-kota pusat pendudukan sekutu. Tidak demikian di pedesaan, Namun karena demikian dahsyatnya “getaran” wacana revolusi tersebut, pada gilirannya desa-desa di pedalaman pun ikut andil di dalam pergolakan-pergolakan local.

Kata Kunci: Revolusi, Sejarah, Tokoh

A. Pendahuluan

Potret revolusi Indonesia sebagai sebuah proses sejarah memiliki makna yang signifikan bagi upaya penataan kehidupan masyarakat yang pluralis dalam bingkai Negara yang demokratis. Karena sejarah, demikian Sartono Kartodirdjo, seorang pakar sejarah, merupakan “suatu dialog antar masa kini dan masa lampau”,¹ yang dijadikan dalam melangkah ke masa depan yang lebih baik. Dalam konteks Indonesia, wajah revolusi itu setidaknya meliputi dua kategori, yaitu revolusi nasional² (baca: politik) dan revolusi social.³ Yang secara substansial merupakan proses perwujudan transformasi structural dan cultural secara radikal, mendadak dan berskala besar menuju kehidupan yang merdeka dan demokratis.

Berpijak dari konsepsi tersebut, pertanyaan yang pantas diajukan bagi revolusi Indonesia adalah seberapa jauh revolusi tersebut “mampu dan berani” merealisasikan transformasi structural dan cultural sekaligus, *in-case* perubahan dari struktur feodalisme (Prancis Feodalite) ke struktur egalitarianism dan demokratis. Sehubungan dengan konsep feodalisme dalam masyarakat Indonesia, menurut Fachry Ali, tidak sempat ada feodalisme lebih merupakan pengalaman social-ekonomi, politik dan budaya tipikal masyarakat Eropa daripada suatu fenomena universal.⁴ Kendatipun secara konseptual tidak ditemukan pada wacana kebahasaan, namun dalam konteks historis hal itu ditemukan dengan dijajahnya Indonesia oleh Belanda selama kurang lebih tiga setengah abad (350 tahun).

Untuk dapat melihat lebih tajam persoalan tersebut, perlu juga dipertanyakan seberapa besar peranan sentral tokoh-tokoh revolusioner dalam menyusun strategi perjuangannya guna tercapainya kebebasan (*freedom*) dan kebersamaan? Selain pertanyaan pokok tersebut,

¹ Sartono Kartodirdjo, “beberapa perspektif dalam studi revolusi Perancis dan Revolusi Indonesia”, dalam Henri Chambert Loir dan Hasan Muarif Ambary (ed), *Panggung Sejarah* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hal. 105

²Revolusi Nasional atau yang biasa juga disebut sebagai revolusi politik adalah suatu revolusi untuk merubah tata kehidupan colonial/ feudal kepada tata kehidupan nasional (merdeka).

³Revolusi Sosial ialah suatu revolusi untuk merubah struktur masyarakat feudal menjadi masyarakat yang demokratis.

⁴Pengertian feudal itu berasal dari kata *feodum*, yaitu bentuk hak milik atas tanah (oleh kalangan tertentu).Lihat Fachry Ali, “Tesis Tentang Feodalisme di Indonesia”, dalam *ulum al-Qur'an*, 4/7/97, hal. 3.

bagaimana pula peran rakyat kecil (*wong cilik*) atau rakyat kebanyakan (*grassroot*) dalam revolusi itu, baik yang berdomisili di kota maupun di pedesaan?

Dari ketiga pertanyaan di atas, diharapkan tidak sekedar ditemukannya makna-makna besar yang bersembunyi dari fenomena historis yang masih gelap itu, melainkan juga makna-makna baru yang selama ini “tidak dipikirkan” meminjam istilahnya Mohammed Arkoun, pemikir Islam kontemporer asal Al-Jazair – oleh sejarawan. Lebih-lebih pelacakan fenomena historis ini melalui pemikiran kritis dan mendalam (baca: filsafat sejarah).⁵

B. Melukiskan Wajah Revolusi: Sebuah Perspektif

Secara konseptual, diakui atau tidak, revolusi sering dipahami sebagai: proses untuk mewujudkan terjadinya transformasi structural dan cultural secara cepat, radikal, dan total di tengah-tengah masyarakat yang tertindas, baik dalam tataran politik maupun social. Yang *mainstream* utamanya adanya perubahan struktur feudal-kolonial menjadi struktur demokratis.⁶ Dalam konteks kebahasaan, lawan istilah revolusi ini adalah evolusi, yaitu perubahan secara pelan, bertahap dan kontinu.

Revolusi sebagai sebuah wacana actual di tengah kemelut kebangsaan pasca kemerdekaan (baca: pasca proklamasi 1945), pada mulanya hanya terasa di kota-kota pusat pendudukan sekutu. Sementara di daerah pedesaan boleh dikatakan perjuangan telah selesai lantaran di desa merasa tidak langsung bersentuhan dengan agresi militer asing. Namun karena demikian dahsyatnya “getaran” wacana revolusi tersebut, pada gilirannya desa-desa di pedalaman pun ikut andil di dalam pergolakan-pergolakan local.

Dalam perspektif masyarakat awam (*wong cilik*), revolusi yang terjadi pasca kemerdekaan itu tidak hanya ditujukan kepada pengenyaha (pelenyapan) kekuasaan asing yang *despotis*, melainkan juga pengenyahan kepada sisa-sisa colonial yang tercermin pada pegawai-pegawai dan swapraja, yang sejak dulu menjadi antek-anteknya

⁵ Menurut Hegel, yang dimaksud dengan Filsafat Sejarah (*the philosophy of History*) adalah *thinking about the world as a whole*. R. G. Collingwood, *The Idea of History* (London: Oxford University Press, 1956) hal. 1.

⁶ Sartono Kartodirdjo, “Beberapa Perspektif dalam Studi Revolusi Prancis dan Revolusi Indonesia”, dalam Henri Chambert Loir dan Hasan Muarif Ambary (ed) *Panggung Sejarah* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hal. 106.

pemerintah jajahan. Pandangan ini tidak dapat disalahkan, karena masyarakat kecil merasa dijajah, bukan hanya oleh bangsa asing, malah oleh “oknum” bangsa sendiri yang bertingkah feodalis. Dengan kata lain, cakupan wilayah revolusi tidak hanya bersifat eksternal (terhadap kekuatan asing), malah juga bersifat internal (terhadap kekuasaan pribumi yang despotis).

Gerakan yang dilancarkan oleh daerah-daerah itu pada umumnya menyerang penguasa setempat, aristokrasi, bangsawan, pamong praja yang dipandang sebagai golongan konservatif-reaksioner, kolaborator dari penguasa dan penjajah, atau sebagai *establishment* yang secara *a priori* dianggap sebagai anti revolusi serta demokrasinya. Untuk meminjam istilah kontemporer, golongan elite itu “didaulat”.⁷

Artikulasi revolusi, bagi kelompok ekstrem, tidaklah cukup manakala perubahan itu sebatas persoalan-persoalan structural *an sich*, hal ini dilandasi dari konsep revolusi itu sendiri yang mengharapkan terjadinya perombakan secara totalitas yang diikuti dengan perombakan administrasi yang dahulu pernah ditinggalkan penjajah, Belanda dan Jepang misalnya. Tegasnya, artikulasi dari revolusi ini mesti meliputi multidimensional. Bahkan “tenaga-tenaga professional” sekalipun, yang dahulunya dipandang sebagai kaki tangan “pemerintah penjajah”⁸ mesti diganti, kendatipun pergantian itu dilakukan secara bertahap dan berangsur-angsur. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan “warna *status quo*”. Kalau dapat dipercepat, maka dalam bentuk pembubaran, seperti halnya di Jakarta berkaitan dengan detasemen polisi. Alasan yang pantas dikemukakannya adalah, sekalipun Negara baru mendapatkan momennya untuk menata kehidupan *clean government*, namun bukan berarti mesti menggunakan “tangan-tangan lama” yang dipandang kotor, melainkan bagaimana memakai ahli-ahli yang walaupun sedikit tetapi mendapat kepercayaan rakyat.

Sebagai bukti ketidakpuasan daerah, rakyat pada umumnya, terhadap struktur feodal itu tercermin dari sikap-sikap “beringas dan kejam” yang muncul di beberapa daerah, seperti pemberontakan yang terjadi di Pekalongan dan Sumatra Timur. Penyebab utama dari kekacauan di kalangan masyarakat bawah itu lebih disebabkan kondisi nasional yang sedang diliputi kekacauan politik akibat agresi militer

⁷Sartono, hal. 109.

⁸Hindia Belanda dan Jepang

asing, ditambah lagi belum ada reaksi dari figure nasional yang bertanggung jawab atas gejala tersebut. Akhirnya gejala ketidakpuasan pun terus merambah ke daerah lain seperti Aceh, Banten, Jakarta, Priangan, dan Surakarta.

Tatkala kehidupan bangsa semakin diambang kehancuran dengan maraknya pergolakan-pergolakan daerah, Soekarno-Hatta sebagai bapak bangsa pun tidak mau tinggal diam. Mereka berdua menyadari bila “gelombang revolusi” ini dibiarkan berlarut-larut, maka hanya akan membawa pada instabilitas nasional yang berkepanjangan. Sebagai respon atas *setting* sosio-politik tersebut, Soekarno-Hatta mengeluarkan maklumat yang isinya sebagai berikut:

“...kami tidak mengizinkan masyarakat bertindak sendiri-sendiri. Segala tindakan yang bercorak Nazi dan fasis harus dibuang...

Untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional..., kita sanggup menjamin berlakunya dasar-dasar peri kemanusiaan sebagai sumber daripada keadilan social...

Negara kita adalah Negara hukum berdasar kepada kedaulatan rakyat, dan kedaulatan rakyat bukanlah anarkhi...

...hanya pemerintahlah yang berhak menjalankan hukuman dengan perantara mahkamahannya...

Pemerintah republik Indonesia sedang berusaha menyusun secepat-cepatnya Tentara Keamanan Rakyat untuk menanggung keamanan rakyat dalam negeri...

“...perbedaan faham tidak boleh menjadi sebab yang satu golongan menangkap dan menawan lawannya pada tempat yang tidak diketahui, karena hal ini bisa menimbulkan perpecahan antara kita dan mungkin menimbulkan perang saudara.”⁹

Dareah-daerah yang dapat dipandang belum secara tegas mengikuti instruksi tokoh bangsa itu antara lain Jawa Barat (Banten, Karawang, Bogor, dan Priangan), Pekalongan, dan Sumatera Timur. Di Banten khususnya, gerakan revolusi terhadap tatanan internal daerah semakin intensif dan sporadic yang dipelopori kaum ulama (Kyai). Melalui revolusi itu, akhirnya para kyai memiliki peran penting dalam jajaran pemerintahan, seperti halnya Kyai Khotib, menjabat residen dan Kyai

⁹William H. Frederick dan Soeri Soeroto, *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi* (Jakarta: LP3ES, 1984), hal. 314-315.

Samiun menjabat Bupati Serang. Sementara pejabat-pejabat lama yang pada umumnya berasal dari Priangan itu mudik, bahkan ada yang dipenjarakan. Fenomena ini memberikan keunikan tersendiri bagi Banten yang para pejabatnya secara umum tidak memiliki pengalaman sebagai birokrat.

Realitas tersebut semakin diperparah dengan tampilnya “bapak rakyat”, baik di Banten dikenal Ce Mamat maupun di Tangerang dikenal Kyai Akhmad. Tampilnya “bapak rakyat” di tengah-tengah masyarakat daerah ini sebagai obat atas kerinduan akan keadilan atas sistem feodalisme. Rakyat lebih patuh terhadap *policy* mereka ketimbang instruksi pemerintah yang masih dianggapnya sebagai “kaki tangan” pemerintah penjajah.

Dari paparan tersebut jelaslah bahwa sebuah konsep yang sama, revolusi misalnya, bila ditinjau dari perspektif yang berbeda dan walaupun lewat perspektif yang sama, namun dengan latar belakang *sosio-kultural* yang berbeda, maka pemaknaan dan interpretasi terhadap konsep itu pun menjadi berbeda pula. Seperti halnya “perbedaan interpretasi” antara masyarakat awam dan kelompok ekstrem dalam memaknai revolusi.

C. Wajah Revolusi dan Tokoh Revolusioner

Sebagai sebuah proyek besar, revolusi tidak dapat dipisahkan dari peran tokoh revolusioner, baik dari kalangan kaum ulama (agamawan) maupun kalangan intelgensia. Para tokoh revolusioner yang dimotori oleh para kyai pada umumnya mengambil tempat di daerah-daerah, sementara di kota-kota besar, terutama kota pusat pemerintahan dipelopori oleh kaum intelgensia, seperti Tan Malaka, Soekarno, Hatta dan Syahir.

Tampilnya kaum intelgensia di tengah kemelut bangsa memiliki peran penting. Mereka memegang peran kunci dan strategis. Kedudukan sosio-historisnya juga memberikan ruang gerak social, cultural, dan politik, melawan batasan-batasan masyarakat colonial yang diskriminatif, selanjutnya mampu menemukan identitasnya kembali dan mengkonseptualisasikan Indonesia sebagai *nation*. Dengan ideology nasionalisme dapat digerakkan sebagai gerakan social untuk merealisasikan tujuan perjuangan. Terlebih status golongan intelgensia yang tidak homogeny, berakibat bagi beragam aliran politik, dari yang radikal sampai yang moderat, koperatif dan non-koperatif, elitis dan

populis, dan sebagainya.¹⁰

Sebagai tokoh *legendaries* revolusioner, Tan Malaka seringkali dalam menjalankan roda revolusinya melakukan penyamaran untuk menghindari, sekaligus mengelabui *spion* (intel) colonial yang pernah mengerjar-mengejanya. Lantaran demikian agungnya perjuangan Tan Malaka bagi perjuangan negaranya, sehingga salah satu Koran, *the tribun*, mensejajarkannya dengan patriot Filipina angkatan Josh Rizal, dan oleh Karen itu merupakan simbol yang jelas dari “pergerakan nasionalis Jawa”.¹¹

Watak legendaris dari Tan Malaka ini terlihat dari upayanya untuk menjadikan dirinya sebagai sumber konflik atau kontroversi, bahwa seluruh hidupnya, termasuk kehidupan mentalnya, merupakan pertarungan yang tak habis-habisnya.¹² Di saat-saat genting sekalipun, ia masih mampu melahirkan pemikiran-pemikiran jernih dan tawaran-tawaran konseptual yang konstruktif. Atas usahanya yang tidak kenal lelah itu, pantaslah manakala ia dikenal sebagai tokoh revolusioner, pemikir yang kreatif sekaligus seorang yang idealis.

Sikap-sikapnya yang cenderung produktif dan konsutif, demikian Rudolf Mrazek, adalah tipe masyarakat Minangkabau akhir abad lalu atau permulaan abad ini (baca abad 20) yang mempunyai dinamisme dan anti parokhialisme sebagai cirri khasnya.¹³ Analogi ini terlihat dari perjuangan masyarakat dengan pengalamannya yang memiliki perspektif, yang hingga kini masih eksis, yakni adat dan falsafat Minangkabau yang senantiasa menyulut konflik, namun tetap tegar dalam keunikannya. Sebagai sampel, tatkala terjadi kontak antara adat dan Islam, maka adat masih dapat berdiri tegar dan kokoh. Bila dilirik ke belakang, kenyataan ini didasari pada karakteristik masyarakat Minangkabau yang mampu menggunakan perspektif dinamisme dan anti-parokhialisme. Fenomena tersebut diperkuat lagi dengan watak “rantau”-nya yang dapat menumbuhkan sikap kritis, obyektif, toleran dan terbuka. Hal ini seiring dengan falsafah hidup masyarakat Inggris ketika orang tua memberikat wejangan kepada anak-anaknya, “*if you know only English, you don't know English*”.

Dengan demikian, pembentukan watak Tan Malaka itu bukan

¹⁰ Sartono, Op. Cit., hal. 111.

¹¹ Fredderick, Op. Cit., hal. 330

¹² Ibid., hal. 331

¹³ Ibid..hal. 332

hanya didasari factor *hereditas* semata, melainkan karakteristik masyarakat juga menjadikannya sebagai tokoh yang kreatif dan berwibawa. Ini tentunya sebagai hasil “perantauan yang panjang” dengan kemampuannya menarik premis-premis minor dari masing-masing daerah yang pernah dikunjunginya.

Keserasian watak Tan Malaka dan masyarakat Minangkabau ini dapat dibuktikan dengan logika berpikirnya yang bertolak belakang dari “thesis-anthitesis-syntesis”. Pemikiran Tan Malaka ini nampaknya banyak diwarnai dialektiknya Hegel, bahkan mungkin Marxisme-Leninisme. Hal ini senada dengan prinsip hidupnya bahwa “kekuatan ide” (*the power ideas*) merupakan perangsang perubahan. Melalui kekuatan idenya itu, ia ingin menyenyapkan imperialism dan mengikis habis sisa-sisa feodalisme.

Di samping Tan, dikenal juga tokoh revolusioner lain, seperti Soekarno. Sebagai tokoh yang dibesarkan dalam kultur Hindu-Jawa yang kental – yang tidak disukai Tan Malaka, Soekarno dapat juga disebut sebagai tokoh revolusioner dengan kemampuannya melahirkan ide-ide berbobot dan berani. Salah satu maha karya pemikirannya yang original dan jernih adalah “*marhaenisme*”.¹⁴

Di samping kedua tokoh tersebut, tokoh lain yang dipandang memberikan kontribusi signifikan dalam revolusi Indonesia adalah Syahrir. Berbeda dengan Tan yang berhaluan radikal, Syahrir lebih cenderung memilih jalur diplomasi dalam revolusinya. Bagi Syahrir, dalam suasana yang kurang mendukung bagi berlangsungnya Negara Indonesia dalam tataran internasional, upaya revolusi demokratis sebagai senjata “ideologis” (*ideological weapon*) sangat tepat dalam menumpas fasisme. Ia tidak menghendaki revolusi itu hanya akan menjadi terorisme yang legal.¹⁵ Dengan kata lain, jalur diplomasi akan lebih ampuh ketimbang “mengangkat senjata”.

Dengan tampilnya tokoh-tokoh revolusioner sebagai “motor pebgerak” revolusi, setidaknya dapat dipetakan ke dalam dua kategori, yaitu *pertama*, revolusi yang bersifat non-kooperatif radikal, dengan tokohnya Tan Malaka; dan *kedua*, revolusi yang bersifat kooperatif-moderat, yang tokohnya adalah Soekarno, Hatta dan Syahrir. Pendekatan yang dilancarkan oleh golongan yang pertama lebih memilih perombakan masyarakat secara total dalam segala dimensi kehidupannya yang

¹⁴Ibid., hal. 344

¹⁵Ibid., hal. 351

meliputi politik, ekonomi, social, budaya, sementara golongan yang kedua lebih suka memakai jalur diplomatik dengan tetap mempertahankan hal-hal “warisan lama” yang dipandang masih perlu dilestarikan.

D. Wacana Revolusi dalam Kajian Filsafat Sejarah

Dalam konteks perkembangan suatu masyarakat politik (*political society*), revolusi Indonesia sebagai instrumen mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban (baca: *Civil Society*) dituntut memiliki keberanian untuk melakukan perlawanan, baik secara fisik maupun non fisik terhadap hegemoni imperialism. Upaya ini, dalam konteks historis dikenal dengan “*challenge and response*”, sebuah konsep historis yang dicetuskan oleh Arnold Toynbee.¹⁶

Perlawanan fisik sebagai wujud keberanian masyarakat Indonesia ini nampak dari gelombang pergolakan daerah yang dipicu oleh para kyai pedesaan. Pergolakan daerah, yang disebut Sartono Kartodirdjo sebagai “kontra revolusi”¹⁷ merupakan revolusi sosial.

Pemicu dari revolusi sosial tersebut adalah “penyempitan” ruang gerak kyai dalam struktur masyarakat feodal. Akibatnya, melalui semangat jihad-nya, mereka secara tegas tidak hanya punya keberanian moril untuk menentang penjajahan, tetapi juga didukung dengan kemampuan material para tokohnya yang memiliki charisma yang tinggi di tengah-tengah masyarakat.

Sementara perlawanan non fisik, lebih banyak dilakukan para intelgensia, seperti Tan Malaka. Untuk membangun semangat juang melawan penjajahan, Tan Malaka secara tegas menolak jalur diplomasi. Karena jalur tersebut dianggap tidak dapat menuntaskan arti besar sebuah revolusi.

Sebagai sebuah gagasan, tentunya revolusi tidak akan bermakna apa-apa manakala tidak dibarengi dengan tampilnya tokoh-tokoh revolusioner. Terealisasi atau tidaknya sebuah gagasan ditentukan oleh kejelian dan kelihaiannya para tokoh revolusioner dalam mencari “jembatan penyebrangan” bagi revolusinya. Tanpa jembatan yang jelas, maka revolusi pun tidak sampai pada sasaran.

Bila ditilik secara seksama mengenai berhasil atau tidaknya

¹⁶ Lihat Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: UI-Press. 1986), hal. 189

¹⁷ Sartono, beberapa, hal. 109

revolusi Indonesia, peling tidak ada dua cara pandang, *pertama*, revolusi Indonesia dalam konteks diplomasi sebagaimana yang diharapkan oleh Syahrir Cs terbilang berhasil. Ini terbukti dengan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan terlepas dari gangguan dunia internasional setelah dilakukannya diplomasi; dan *kedua*, dari sudut revolusi total seperti cara pandang Tan Malaka dengan terjadinya perubahan struktur feodal secara total dapat dikatakan belum mencapai momennya. Adapun mengenai revolusi sosial yang dilakukan para ulama tidak memiliki dampak berarti bagi transformasi structural, paling-paling hanya menghapus beberapa lembaga tradisional-feodal, seperti personalia kepomongprajaan.

Meskipun implementasi dari sebuah gerakan revolusi itu diperhadapkan pada dua pilihan antara “berhasil dan tidak berhasil”, namun revolusi Indonesia sebagai sebuah proses sejarah memiliki nilai manfaat yang sangat besar bagi kajian Filsafat Sejarah. Karena dari fakta sejarah tersebut dapat ditangkap pola-pola yang terjadi, tentang siapa yang menjadi motor penggerak revolusi tersebut, sekaligus juga ingin melihat sejauh mana sasaran yang dapat dicapai dalam perjuangan revolusi. Sebagaimana dikatakan Hegel,¹⁸ bahwa sebuah peristiwa sejarah itu dapat diidentifikasi melalui tiga unsure, *pertama*, pola, *kedua*, motor penggerak, dan *ketiga*, sasaran yang dituju. Lebih lanjut Hegel katakan bahwa pengungkapan ketiga unsur dalam konteks historis itu, dimaksudkan untuk mengetahui struktur-struktur terdalam dari sebuah fakta sejarah.¹⁹

Senada dengan Hegel, Taufik Abdullah, pakar sejarah dari LIPI, mengatakan bahwa sejarah itu dapat dianalisis melalui tiga kecenderungan pemikiran sejarah yang meliputi tiga hal, *pertama*, sejarah semata-mata sebagai lambing bagi usaha masa kini; *kedua*, sebagai warisan yang harus diikuti suri ketauladannya; *ketiga*, sejarah adalah sejarah (kejadian masa lampau yang harus diteliti kebenarannya).²⁰

Bertolak dari tiga kecenderungan tersebut, dapat dikatakan bahwa revolusi Indonesia yang terjadi pada tahun 1945 sampai dengan

¹⁸ F.R. Ankersmit, *Refleksi tentang Sejarah: Pendapat-pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah* (Jakarta: Gramedia, tt), hal. 17.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 3-4

²⁰ Lebih jelasnya lihat Taufik Abdullah dan Abdurrahmann Suryomihardjo, *Ilmu Sejarah dan Historiografi* (Jakarta: Gramedia, tt).

1949 yang lebih dikenal dengan revolusi fisik itu merupakan “sejarah sebagai sejarah”, karena terdiri antara ruang dan waktu. Untuk membuktikan kebenaran dari sebuah sejarah ini dapat dilakukan melalui kajian keotentikan dan kredibilitas sebuah fakta sejarah. Demikian halnya dengan keberlangsungan kemerdekaan Indonesia sejak tahun 1945 hingga kini merupakan warisan “perjuangan” para tokoh revolusioner, yang dipelopori oleh kaum intelgensia dan para ulama, sekaligus masyarakat dengan semboyan *jihad*-nya. Sementara artikulasi “revolusi” itu sendiri merupakan lambing perjuangan bangsa Indonesia dalam menentang imperialism. Perpaduan antara tokoh ulama dan intelgensia dalam menghadapi struktur feodalis merupakan hubungan kebersamaan, yang dalam istilahnya P.J. Zoetmulder adalah “*the political and sacral aspects were inseparably linked together*”.²¹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa revolusi merupakan artikulasi dari maha karya “pemikiran” manusia menuju eksistensi dirinya sebagai makhluk yang bebas dan merdeka. Tampilnya tokoh-tokoh revolusioner yang dipandang sebagai motor penggeraknya tidak lain bertujuan membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu dan hegemoni penjajahan dengan beragam bentuknya. Disadari atau tidak, sebuah fenomena historis itu sebuah konsep baru yang membawa manfaat dan pelajaran (*ibrah*), terutama bagi masyarakat atau *ummat* yang ingin menggali sejarahnya.

E. Penutup

Dari paparan di atas dapatlah disimpulkan bahwa revolusi sebagai instrument perubahan total tidak serta merta membaw perubahan baru yang diinginkan. Melainkan terkadang berjalan tidak sesuai dengan “rel” yang telah direncanakan. Dalam kondisi yang sedang berkecamuk, dalam rumus sejarah, dibutuhkan “tokoh ratu adil” yang dapat menjembatani aspirasi kalangan bawah, sehingga terkristal menjadi kekuatan besar, terlebih lewat gagasan-gagasan briliannya. Seperti dalam kajian filsafat sejarah, ide besar akan membawa perubahan dalam sejarah kemanusiaan. Buktinya, ide-ide yang dilontarkan Tan Malaka, Soekarno,

²¹P.J. Zoetmulder, “The Significance of the Study of Culture and Religion for Indonesian Historiography”, dalam Soejatmoko, et. al. *An Introduction to Indonesia Historiography* (London: Coryanell University Press, 1956) hal. 332

Syahrir, dan ulama, telah membawa Indonesia ke gerbang kemerdekaan sejati. Sekalipun jalan yang mereka tempuh teramat panjang dan berliku, bahkan pengorbanan yang tidak sedikit demi mempertahankan sebuah gagasan yang merupakan cita-cita mulia, yakni “kemerdekaan”.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik dan Abdurrahman Suryomihardjo, *Ilmu sejarah dan Historiografi*, Jakarta: Gramedia, tt.
- Ali, Fachry, “Tesis Tentang Feodalisme di Indonesia”, *Ulum al-Qur'an*, 4/7/97
- Ankersmit, F.R. *Refleksi tentang Sejarah: Pendapat-pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah*, Jakarta: Gramedia, tt.
- Collingwood, RG. *The Idea of History*, London: Oxford University Press, 1956
- Frederick, William H. dan Soeri Soeroto, *Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi*. Jakarta: LP3ES, 1984.
- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Loir, Henri Chambert Loir dan Hasan Muarif Ambary (ed). *Penggung Sejarah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Seoatmoko, et. al. *An Introduction to Indonesia Historiography*. London: Cornell University Press, 1965.